

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL  
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**MEGA AJENG KARTIKASARI  
NIM. 12030115130150**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

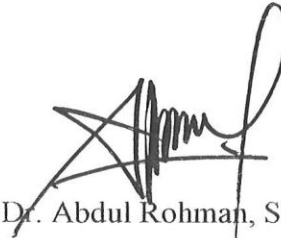
**2019**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Mega Ajeng Kartikasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030115130150  
Fakultas/Departemen : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA  
MODAL (Studi pada Pemerintah  
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun  
2015-2017)**  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 11 Februari 2019

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.

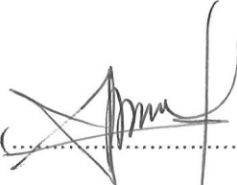


NIP. 196601108 199202 1001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Mega Ajeng Kartikasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030115130150  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL  
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa  
Tengah tahun 2015-2017)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 6 Maret 2019**

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.  (.....)
2. Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt.  (.....)
3. Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.  (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Mega Ajeng Kartikasari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 11 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

(Mega Ajeng Kartikasari)

NIM : 12030115130150

## **ABSTRACT**

*This research is aimed to empirically examine the relation between regional income per capita, gross domestic product of region, general allocation fund, local revenue, financial independence ratio, and allocation of capital expenditure. The dependent variable in this research is allocation of capital expenditure. The independent variables in this research are regional income per capita, gross domestic product of region, general allocation fund, local revenue and financial independence ratio.*

*The sample of this research consist of 35 Regency/Municipality in the Province of Central Java in the period 2015-2017. This research use quantitative method by using report data realization of budget revenues and expenditures (APBD) and also the tables of gross domestic product of region (PDRB) Regency/Municipality in the Province of Central Java. The analytical method that was used is multiple linear regression analysis.*

*The results of this research shows that the variables of regional income per capita, general allocation fund, and local revenue have significant effect on the allocation of capital expenditure. It means that, in determining the amount of income allocated for capital expenditure, local governments should consider regional income per capita, general allocation fund, and local revenue. While the variables of gross domestic product of region and financial independence ratio do not have significant effect on the allocation of capital expenditure.*

*Keywords : Allocation of capital expenditure, regional income per capita, gross domestic product of region, general allocation fund (DAU), local revenue (PAD), financial independence ratio, regional financial performance, economic growth.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara pendapatan regional perkapita, produk domestik regional bruto, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan alokasi belanja modal. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan regional perkapita, produk domestik regional bruto, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Sampel penelitian ini terdiri dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2015-2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan regional perkapita, dana alokasi umum (DAU), dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini berarti bahwa dalam menentukan jumlah pendapatan yang akan dialokasikan untuk belanja modal, pemerintah daerah harus mempertimbangkan pendapatan regional perkapita, dana alokasi umum (DAU), dan pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan variabel produk domestik regional bruto dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Kata kunci : Alokasi belanja modal, pendapatan regional perkapita, produk domestik regional bruto, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi.

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Look for something positive in each day, even if some days you have to  
look a little harder.”*

*“Life is short. Forgive quickly. Love truly. Laugh uncontrollably. And  
never regret anything that made you smile.”*

### **Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

Ibu dan Bapak, yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan kasih sayangnya terhadap saya. Serta keluarga besar, sahabat, teman, dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, segala hambatan yang dihadapi penulis dapat teratasi berkat bantuan, doa, bimbingan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Fuad, S.E.T., M.Si., Akt., Ph.D., selaku Kepala Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat yang terbaik serta penuh

kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

4. Bapak Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si, selaku dosen wali yang senantiasa memberikan pengarahan selama penulis menjalani studi di Universitas Diponegoro.
5. Bapak/Ibu dosen serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah banyak membantu dan memberikan banyak pelajaran kepada penulis selama menjalani studi di Universitas Diponegoro.
6. Orang tua dan kedua kakak tersayang, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, cinta, kebaikan dan dukungan yang tanpa henti kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat penulis yang tercinta, Isna, Dewi, dan Bubu yang telah selalu ada bagi penulis dalam keadaan senang maupun susah. Semoga kita semua dapat segera mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di masa yang akan datang. You guys are the GOAT.
8. Esha, Mutia, Lulu, Desiana, Sasa, Chacha, Irma, dan Lady selaku wanita-wanita hebat yang telah menyayangi, menemani, menyemangati, dan memberikan warna pada masa perkuliahan penulis. I'm truly blessed for being surrounded by such amazing, funny, and kind-hearted friends.
9. Teman-teman KKN Tim 2 Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, atas kenangan, pengalaman dan tawanya selama 42 hari.

10. Teman-teman satu bimbingan, terutama Sasa dan Adita atas motivasi, semangat dan perjuangannya bersama dalam menjalani proses skripsi.
11. Seluruh keluarga besar Akuntansi Undip 15. Terimakasih atas kenangannya yang indah, semoga sukses menyertai kita semua.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna dan didalamnya banyak kekurangan karena pada dasarnya tidak ada ciptaan manusia yang sempurna. Oleh karena itu setiap kritik, saran dan masukan sangat diharapkan penulis agar penelitian ini mampu menjadi karya yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan para pembaca. Akhir kata, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.

Wassalam'ualaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Februari 2019

Penulis,

Mega Ajeng Kartikasari

NIM. 12030115130150

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	11
1.3.2.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.3.2.2 Manfaat Praktis .....	11
1.4 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	14
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....	14
2.1.1 Teori Keagenan.....	14
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	17
2.1.3 Pendapatan Regional Perkapita .....	19

2.1.4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	19
2.1.5	Dana Alokasi Umum (DAU).....	20
2.1.6	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	21
2.1.7	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	22
2.1.8	Analisis Rasio Keuangan Daerah .....	22
2.1.8.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	23
2.1.9	Alokasi Belanja Modal .....	24
2.1.10	Penelitian Terdahulu.....	25
2.2	Kerangka Pemikiran.....	34
2.3	Perumusan Hipotesis.....	39
2.3.1	Pengaruh Pendapatan Regional Perkapita Terhadap Alokasi Belanja Modal.....	39
2.3.2	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Alokasi Belanja Modal.....	41
2.3.3	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal.....	42
2.3.4	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Modal.....	43
2.3.5	Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>46</b>
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	46
3.1.1	Variabel Dependen .....	49
3.1.2	Variabel Independen.....	50
3.1.2.1	Pendapatan Regional Perkapita.....	50
3.1.2.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	50
3.1.2.3	Dana Alokasi Umum (DAU) .....	51
3.1.2.4	Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	52
3.1.2.5	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	52

3.2	Populasi dan Sampel .....	54
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	55
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	55
3.5	Metode Analisis .....	56
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif.....	56
3.5.2	Uji Asumsi Klasik .....	57
3.5.2.1	Uji Normalitas.....	57
3.5.2.2	Uji Multikolonieritas.....	57
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	58
3.5.2.4	Uji Autokorelasi.....	58
3.5.3	Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	58
3.5.4	Uji Hipotesis .....	59
3.5.4.1	Uji Statistik F .....	60
3.5.4.2	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	60
3.5.4.3	Uji Statistik t .....	61
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....		62
4.1	Deskripsi Penelitian .....	62
4.2	Analisis Data .....	64
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	64
4.2.2	Analisis Uji Asumsi Klasik .....	68
4.2.2.1	Uji Normalitas.....	68
4.2.2.2	Uji Multikolonieritas.....	71
4.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	72
4.2.2.4	Uji Autokorelasi.....	74
4.2.3	Uji Hipotesis .....	75
4.2.3.1	Uji Statistik F .....	75
4.2.3.2	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	76
4.2.3.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) .....	77
4.3	Interpretasi Hasil .....	80

4.3.1	Pendapatan Regional Perkapita berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal (H1).....	80
4.3.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal (H2).....	82
4.3.3	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal (H3).....	83
4.3.4	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal (H4).....	85
4.3.5	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal (H5).....	87
BAB V PENUTUP.....		89
5.1	Simpulan .....	89
5.2	Keterbatasan.....	90
5.3	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA .....		93
LAMPIRAN .....		95

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 3.1 Variabel, Definisi, Dimensi, Indikator, dan Skala Pengukuran .....	47
Tabel 4.1 Objek Penelitian .....	62
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	64
Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) .....	71
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas .....	72
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi .....	74
Tabel 4.6 Hasil Uji Signifikansi Simultan F .....	75
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	76
Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual .....	78
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....	80

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	39
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	69
Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot .....	70
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji <i>Scatterplot</i> .....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Kabupaten/Kota Sampel .....	95
Lampiran B Tabulasi Data .....	96
Lampiran C Hasil Analisis Regresi .....	100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab pertama berisikan mengenai pendahuluan. Pendahuluan pada bab ini mencakup penjelasan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Latar belakang dilakukannya penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab 1.1. Selanjutnya, pada sub bab 1.2, 1.3 dan 1.4 masing-masing akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dalam rangka mengelola

dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban (Herawaty, 2011). Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada pusat, dan kedua, pertanggungjawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Salah satu kewajiban horizontal Pemerintah Daerah kepada DPRD dan masyarakat adalah pemerintah daerah berkewajiban untuk mengalokasikan modal yang dimiliki daerah sebagai alat pengendalian, evaluasi kerja, salah satu bentuk pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan. Proses penganggaran belanja modal termasuk unik. Proses ini tidak hanya melibatkan negosiasi di antara pihak eksekutif, tetapi juga sangat bergantung pada masukan dan saran dari insinyur, arsitek, dan perencana. Penganggaran belanja modal juga menuntut pemerintah daerah untuk memperhatikan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan keuangan jangka panjang terutama untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut (Halim & Abdullah, 2006).

APBD merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak, yaitu pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan pihak legislatif (DPRD). UU tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber dana ke dalam belanja-belanja dengan

menganut asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain itu, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin adanya campur tangan dari pemerintah pusat sehingga memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Meningkatnya pelayanan publik di suatu daerah diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di daerah, sehingga dapat memicu terciptanya pembangunan daerah yang optimal, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik di sektor publik, pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi belanja modal. Pengalokasian belanja modal tersebut bertujuan untuk menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian daerah.

Pembangunan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan publik suatu daerah dilaksanakan berdasarkan dana yang dialokasikan untuk belanja modal. Belanja modal merupakan angka yang memberikan gambaran terkait upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Pembangunan daerah yang optimal dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat digambarkan dengan meningkatnya nilai produk domestik regional bruto (PDRB). Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat maka diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus

meningkatkan alokasi belanja modal guna menambah dan memperbaiki infrastruktur agar mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

Pertumbuhan ekonomi daerah memicu terjadinya peningkatan terhadap pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan regional perkapita (Harianto & Hari Adi, 2007). Meningkatnya pendapatan regional perkapita dalam suatu daerah mencerminkan adanya peningkatan taraf kesejahteraan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan cenderung mendorong masyarakat untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif tersebut berdampak pada berputarnya roda perekonomian di sektor-sektor ekonomi daerah. Dengan meningkatnya taraf kesejahteraan dan aktivitas perekonomian masyarakat dapat berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah, karena memberikan pemasukan pada pendapatan daerah dalam bentuk setoran pajak dan retribusi daerah. Kontribusi dari pendapatan regional perkapita yang tinggi dapat digunakan untuk membantu pemerintah daerah mengurangi subsidi dan mengalokasikan dana untuk belanja modal yang lebih tinggi.

Sumber dana pengalokasian belanja modal dalam APBD adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan salah satu indikator pengukuran keberhasilan otonomi daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin

tingginya PAD suatu daerah diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan semakin baik. Namun dalam realisasinya, peningkatan pendapatan asli daerah tidak selalu diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan dikarenakan pemerintah daerah cenderung mengalokasikan lebih banyak pendapatannya untuk membiayai belanja operasional (Oktora & Pontoh, 2013).

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan pemerintahannya, yang berakibat pada terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Upaya pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut adalah dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah pusat berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 adalah dana alokasi umum (DAU). Pengalokasian DAU diserahkan dalam bentuk block grant, yaitu bantuan dana yang tidak disertai dengan syarat-syarat tertentu yang mengakibatkan dana tersebut mengalami pemborosan. Pada dasarnya DAU seharusnya dipergunakan untuk belanja modal guna pembangunan daerah, tetapi kenyataannya sebagian besar dana tersebut dipakai oleh pemerintah daerah untuk belanja pegawai. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk belanja modal yang bisa menggerakkan perekonomian daerah.

Keuangan daerah merupakan sumber daya yang dominan dalam menopang kemampuan otonomi daerah, karena hampir seluruh kegiatan pemerintah di daerah memerlukan biaya. Berdasarkan fakta tersebut, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu variabel yang penting dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan di daerah pada umumnya (Lubis & Hafni, 2013). Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam APBD dan dapat diukur dengan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam analisis kinerja keuangan daerah merupakan perbandingan hasil yang dicapai dari satu periode ke periode sebelumnya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Salah satu jenis rasio yang sering digunakan dalam analisis kinerja keuangan daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah (Halim, 2007). Kegunaan dari analisis rasio kemandirian keuangan daerah adalah mampu menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah (Halim, 2007). Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan begitu pula sebaliknya. Selain itu, rasio kemandirian daerah yang tinggi juga menggambarkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD (Halim, 2007). Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentunya diharapkan mempunyai pengaruh positif terhadap kemajuan suatu daerah (Jayanti dkk., 2014).

Tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di semua pemerintah daerah di Indonesia adalah alokasi APBD untuk belanja modal yang telah diserap untuk pengeluaran rutin yang relatif kurang produktif. Pemerintah daerah cenderung mengalokasikan lebih banyak pendapatannya untuk kebutuhan operasional yang mengakibatkan tidak memadainya dana untuk membiayai belanja modal. Alokasi sumber daya ke dalam anggaran belanja modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik berupa fasilitas umum dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun kenyataannya, efektivitas dan efisiensi belanja ke daerah masih dinilai rendah karena pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Berdasarkan data dari (RPJM, 2014) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dianggap belum optimal karena sebagian besar uang APBD masih dialokasikan untuk belanja pegawai negeri dan alokasi belanja modal masih tergolong rendah.

Data dari (DJPK, 2017) menunjukkan bahwa rata-rata alokasi belanja pegawai kabupaten/kota dalam APBD 2014 dan 2015, mencapai hingga 40%. Sedangkan realisasi belanja modal di kabupaten/kota hanya mampu memenuhi proporsi belanja modal dengan rata-rata sebesar 20% dari total belanja daerah di tahun yang sama. Keadaan ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dalam usaha mendorong pembangunan daerah. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 pemerintah pusat memberikan target rata-rata belanja modal pemerintah daerah sebesar 30% dari total belanja daerah untuk meningkatkan dan memperbaiki pembangunan daerah (RPJM, 2014).

Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Nurlis (2016), yang menguji pengaruh dari pendapatan regional perkapita, kepadatan penduduk, PDRB, DAU, dan PAD terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2011-2013. Beberapa perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penggunaan variabel independen dan sampel penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel independen tambahan berupa rasio kemandirian keuangan daerah dan menghapuskan variabel kepadatan penduduk karena bersifat non keuangan. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017. Populasi penelitian yang diambil merupakan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan alasan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 dan 2016, belanja operasional Provinsi Jawa Tengah mencapai 77,8% dan 78,6% dari total belanja daerah. Sedangkan realisasi belanja modal di tahun yang sama hanya sebesar 22% dan 21% dari total belanja daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih berada di bawah target rata-rata nasional.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis sejauh mana variabel pendapatan regional perkapita, PDRB, DAU, PAD, dan rasio kemandirian keuangan daerah, mampu mempengaruhi pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Judul penelitian yang akan dilakukan penulis adalah **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG**

## **MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Isu mengenai pengaruh dari pendapatan regional perkapita, produk domestik regional bruto (PDRB), dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD), dan rasio kemandirian keuangan daerah, terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah merupakan suatu isu yang menarik dan cukup penting untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, mengenai faktor-faktor yang mampu mempengaruhi pembuatan keputusan dalam mengalokasikan belanja modal agar dapat dikelola secara optimal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada sub bab 1.1, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan regional perkapita berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?
2. Apakah produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?
4. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?

5. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam sub bab ini berisikan penjelasan atas dua pokok bahasan, yaitu tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian akan dijabarkan pada sub bab 1.3.1 dan manfaat penelitian akan dijabarkan pada sub bab 1.3.2. Adapun sub bab 1.3.2 ini terbagi atas dua bahasan, yaitu manfaat secara umum yang dijelaskan pada sub bab 1.3.2.1 serta manfaat bagi peneliti dan penelitian selanjutnya yang dijelaskan pada sub bab 1.3.2.2.

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada sub bab 1.2, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh pendapatan regional perkapita terhadap alokasi belanja modal.
2. Menguji pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap alokasi belanja modal.
3. Menguji pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal.
4. Menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal.
5. Menguji pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara umum dijelaskan pada sub bab 1.3.2.1 dan manfaat bagi peneliti dan penelitian selanjutnya dijelaskan pada sub bab 1.3.2.2.

#### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian dalam mengembangkan literatur di bidang Akuntansi khususnya Akuntansi Pemerintahan, terkait pemahaman akan pengaruh pendapatan regional perkapita, produk domestik regional bruto (PDRB), dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD), dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

Penelitian ini memiliki manfaat bagi pemerintah daerah dalam memberikan informasi dan pertimbangan mengenai manajemen APBD yang efektif dan efisien, terutama berkaitan dengan alokasi anggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan kebutuhan publik, seperti fasilitas infrastruktur, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan di jajaran pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan dan peraturan yang

terkait dengan peningkatan kinerja keuangan daerah dan pengalokasian belanja modal.

## 2. Investor

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi investor maupun calon investor tentang perlunya analisis pengalokasian belanja modal dalam mempertimbangkan keputusan investasi, sehingga tidak dirugikan karena buruknya pengelolaan keuangan daerah.

## 3. Akademisi

Penelitian ini bagi akademisi dapat menambah wawasan di bidang sektor publik, terkait pengaruh pendapatan regional perkapita, PDRB, DAU, PAD, dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal.

## 4. Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan yang baik dalam usaha pengembangan penelitian selanjutnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis terbagi dalam 5 bab sebagai berikut:

1. Bab I adalah Pendahuluan, pada bagian ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

2. Bab II adalah Telaah Pustaka, pada bagian ini berisikan landasan teori yang digunakan yaitu teori keagenan, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis dari penelitian.
3. Bab III adalah Metode Penelitian, pada bagian ini dijelaskan mengenai variabel yang digunakan, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian, serta metode pengumpulan data dan metode analisis.
4. Bab IV adalah Hasil dan Analisis, pada bagian ini menyajikan deskripsi atas objek penelitian, langkah-langkah analisis data penelitian dan interpretasi hasil uji statistik penelitian.
5. Bab V adalah Penutup, pada bab ini akan disajikan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan serta diuraikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.